



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 9815-9823

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Akses Permodalan dan Dana Anggota

Pramelani¹, I Gede Novian Suteja², Akmal Iskandar³ Dea Marsela⁴, Putri Maira Aprilianti⁵, Wijayanti⁶, Lativah

Amalia Sudarno Putri⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷ Universitas Bina Sarana Informatika

pramelaniofficial@gmail.com

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memainkan peran penting dalam inklusi keuangan di Indonesia, namun efektivitasnya dalam mendukung pembiayaan produktif masih terbatas. Penelitian ini menganalisis peran KSP X cabang Cikampek dalam menyediakan akses permodalan bagi anggotanya melalui analisis mekanisme pembiayaan, struktur bunga, dan sistem mitigasi risiko. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumen. Teknik penelitian ini adalah KSP dipilih secara purposive sampling berdasarkan karakteristik uniknya sebagai koperasi berbasis pekerja industri. Hasil yang diterima dari penelitian di KSP menunjukkan dari 900 anggota, 97,8% adalah pekerja formal dan hanya 2,2% pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Koperasi menerapkan bunga flat 1,9% untuk pinjaman konsumtif dan 1,25% untuk produktif. Dominasi pembiayaan konsumtif mencapai 98,7%, sementara pembiayaan UMKM hanya 1,3% akibat ketidaksesuaian desain produk: tenor pendek (12 bulan), setoran mingguan, simpanan awal Rp. 1 juta, dan persyaratan legalitas yang tidak selaras dengan karakteristik usaha mikro. Di samping itu, sistem mitigasi risiko berbasis slip gaji efektif untuk pekerja formal namun tidak memadai untuk UMKM karena ketiadaan monitoring dan pendampingan usaha. Penelitian ini mengungkap paradoks inklusi-eksklusif: koperasi berhasil melayani pembiayaan konsumtif pekerja formal namun gagal menjangkau pembiayaan produktif UMKM, menunjukkan perlunya diferensiasi produk berbasis risiko dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Kata kunci: Koperasi; Simpan Pinjam; Akses Modal; Dana, Anggota

1. Latar Belakang

Koperasi di Indonesia memiliki akar sejarah yang kuat sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dan telah diakui sebagai salah satu tiang utama perekonomian nasional. Semakin berkembangnya waktu, koperasi memperkuat posisinya sebagai lembaga yang menawarkan layanan keuangan yang fleksibel atau mudah dan dekat dengan kebutuhan anggota, sehingga mendorong terciptanya akses keuangan yang lebih merata [1].

Dalam hal keuangan inklusif, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang paling dekat dengan masyarakat lapis bawah, termasuk karyawan, petani, nelayan dan pelaku usaha mikro[2]. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan Lembaga keuangan non-bank yang beroperasi dengan prinsip swadaya, setia kawan, dan demokratis dengan kegiatan utama menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan Kembali dalam bentuk pinjam untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif [3]. Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) secara dasar berbeda dengan lembaga keuangan komersial, karena penyesuaian utamanya bukan pada profit maksimal melainkan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota melalui layanan keuangan yang mudah, cepat dan sesuai dengan kapasitas anggota

Menurut data kementerian koperasi dan UMKM per 2024, sekitar 127.846 koperasi aktif di Indonesia, dengan presentase 14,34% diantaranya bergerak dibidang simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam (KSP) berfungsi tidak hanya sebagai perhimpunan dana dan pemberi pinjaman, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memperkuat modal sosial dan kepercayaan antar anggota . Hal ini tercermin dari hubungan antar anggota yang berbasis kedekatan sosial, kepercayaan, dan mekanisme pengawasan bersama, yang pada gilirannya mengurangi biaya transaksi dan risiko informasi ketidaksesuaian yang menjadi kendala dalam pembiayaan mikro

Didalam perjalanannya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mengalami berbagai tantangan kompleks antara lain keterbatasan modal, kompetisi dengan *financial teknologi* dan bank digital, masalah pengelolaan risiko kredit, dan

kesenjangan antara idealisme sebagai lembaga pemberdayaan dan tuntutan profesionalisme sebagai lembaga keuangan yang sehat. Di sisi lain, kebutuhan akan akses permodalan yang mudah, cepat dan terjangkau semakin tinggi, khususnya dari kalangan karyawan dengan pola penghasilan yang tetap namun sering kali memiliki kebutuhan konsumtif mendesak, selain itu dari pelaku usaha mikro (UMKM) membutuhkan tambahan modal usaha yang terkadang menghadapi kendala persyaratan administrasi dan jaminan di perbankan umum [4].

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) X cabang Cikampek hadir sebagai salah satu contoh koperasi yang beroperasi di wilayah kawasan industri. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ini memiliki basis anggota yang unik, seperti mayoritas adalah karyawan pabrik di Kawasan Cikampek dan sekitarnya, dengan plafon kredit relatif homogen (umumnya hingga sekitar 20 juta).

Selain melayani kebutuhan konsumtif karyawan, koperasi ini juga membuka skema khusus untuk anggota yang berprofesi sebagai pelaku usaha mikro. Skema yang menerapkan diferensiasi atau pembeda suku bunga, contohnya 1,9% per bulan untuk pinjaman konsumtif dan 1,25% per bulan untuk pinjaman produktif, dan mekanisme pengelolaan risiko yang khas berupa kewajiban membuka deposito dan persyaratan jaminan yang disesuaikan (berdasarkan data internal koperasi). Pola seperti ini menunjukkan upaya koperasi untuk tetap relevan sekaligus menjaga keberlanjutan operasionalnya.

Penelitian ini sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu, yang membedakan peneliti ini dengan peneliti terdahulu adalah peneliti ini membahas tentang peran koperasi simpan pinjam dalam mendukung akses permodalan dan penggunaan dana anggotanya pada KSP X cabang Cikampek, sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang peranan koperasi simpan pinjam dalam mendukung permodalan UMKM dalam pengelolaan keuangan dari perencanaan keuangan dan anggaran sampai tahap pelaporan berdasarkan penelitian [5] tentang Peranan koperasi simpan pinjam dalam mendukung permodalan UMKM.

Hasil dari wawancara kepada salah satu pengurus sekaligus anggota dari KSP X cabang Cikampek, memberikan paparan bahwa koperasi masih menghadapi beberapa hambatan, terutama ketergantungan pada anggota pekerja formal serta rendahnya penyerapan pembiayaan produktif UMKM akibatnya desain skema pinjaman kurang sesuai dengan karakteristik usaha mikro.

Dalam penelitiannya berjudul “Optimalisasi Peran Koperasi Dalam Mendukung UMKM: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi, dan Ekspansi Pasar”, bahwa banyak UMKM mengalami hambatan akses modal karena syarat pembiayaan yang tidak sesuai dengan kondisi usaha mikro, seperti tenor pendek dan persyaratan administratif yang berat [6]. Hal ini menegaskan bahwa kendala yang dialami KSP merupakan bagian dari masalah umum dalam pembiayaan UMKM. Tetapi KSP X cabang Cikampek terdapat sejumlah temuan yang menunjukkan dinamika yang lebih spesifik dan belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis spesifik terhadap koperasi berbasis pekerja industri dan temuan mengenai ketidaksesuaian skema pembiayaan produktif dengan karakter UMKM yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah, bagaimana peran koperasi simpan pinjam X cabang Cikampek dalam memberikan akses permodalan kepada anggotanya yang mayoritas merupakan karyawan serta pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KSP X dalam menyediakan akses permodalan bagi anggotanya, melalui pengkajian terhadap mekanisme pembiayaan, skema bunga dan persyaratan pinjaman, pola pemanfaatan dana anggota, dan efektivitas sistem mitigasi risiko yang diterapkan.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dapat terlihat pada judul di atas. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan kualitatif adalah bentuk pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan cara penulisan laporan yang berbeda dari pendekatan kuantitatif [7]. Teori metode ini juga dijabarkan keilmuan peneliti lainnya yang mengatakan metode yang menggunakan langkah pengkajian pengalaman yang diterima subjek penelitian seperti segi motivasi, pandangan, perilaku maupun tindakan [8].

Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja, mengumpulkan data secara terbuka, analisis teks atau gambar, representasi informasi dalam gambar dan tabel, serta interpretasi pribadi dari temuan semua yang menginformasikan metode kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif sehingga hasilnya berfokus pada penyajian kondisi nyata di lapangan. Sumber data dari primer dan sekunder. Data primer berasal dari sumber utama yang berdasarkan fenomena penelitian [9]. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap kegiatan operasional koperasi simpan pinjam Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu didapatkan dari sumber primer yang merupakan para informan. Data Sekunder adalah data primer yang sudah diolah atau dikembangkan dan berfungsi sebagai pendukung data primer tersebut. Data sekunder dapat berupa dokumentasi, kajian literatur terdahulu, referensi terpercaya, dan masih banyak lainnya. Definisi lain tentang data sekunder adalah teknik dengan metode *library research* dimana semua data diperoleh dari berbagai buku atau tulisan pustakaan yang sesuai dengan konteks penelitian ini [10]. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi, kajian literatur terdahulu, dan referensi terpercaya proses simpan pinjam [11].

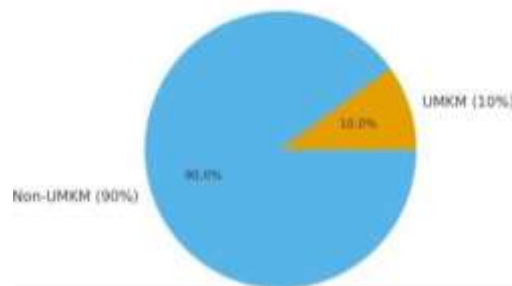
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi Menurut Mills, observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan berfokus dalam melihat serta mencatat serangkaian tingkah laku atau berjalannya suatu sistem yang memiliki tujuan tertentu [12]. Selain itu untuk mengungkap landasan dari tingkah laku dan sistem tersebut. yang lebih mendalam mengenai akses permodalan serta penggunaan dana. Observasi dilakukan untuk melihat bagaimana proses pelayanan dan pencairan dana berlangsung. Studi pustaka digunakan untuk memperkuat pemahaman teori dan membandingkan hasil di lapangan dengan temuan sebelumnya. Data reduksi adalah merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang pokok dan penting, hingga memberikan penjelasan dan gambaran yang lebih jelas serta mudah. Data-data yang diperoleh tersebut harus dianalisis dengan benar [13]. Analisis harus diolah menjadi kalimat yang mudah dipahami.

Reduksi data dilakukan dengan memilah dan mengolah data yang telah direduksi menjadi satu bagian. Pengertian reduksi data yakni menyaring serta membuat sederhana data mentah [14]. Data-data yang telah direduksi disatukan sesuai kategori masing-masing. Data tersebut dimasukkan ke dalam subbagian yang terkait. Dengan disatukan dalam sub-bagian yang sama maka peneliti akan mudah dalam menyusun penelitian. dikelompokkan sesuai tema lalu ditafsirkan agar menghasilkan gambaran yang utuh mengenai peran koperasi simpan pinjam dalam mendukung akses permodalan dan penggunaan dana anggotanya.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Karakteristik Kelembagaan dan Komposisi Anggota

Profil dari anggota Koperasi dari tempat penelitian memiliki karakteristik sebagai berikut:



Gambar 1. Proporsi Anggota UMKM dan Non-UMKM

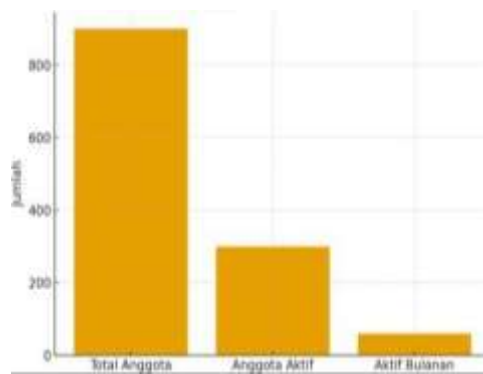
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) X Cikampek beroperasi di kawasan industri dengan dominasi pekerja formal. Kondisi ini membentuk karakter kelembagaan yang khas: struktur layanan, mekanisme penilaian risiko, hingga desain produk keuangan mengikuti pola kebutuhan masyarakat pekerja yang mengandalkan pendapatan bulanan tetap. Dari total 900 anggota, sekitar 880 merupakan pekerja bergaji, sementara 20 anggota adalah pelaku UMKM skala mikro. Ketimpangan komposisi ini menunjukkan bahwa koperasi berkembang sebagai lembaga yang lebih dekat dengan kebutuhan likuiditas rumah tangga ketimbang intermediasi modal usaha.

Di tingkat kelembagaan, fungsi dan model operasional KSP sangat dipengaruhi oleh sifat kepastian pendapatan anggotanya. Produk simpanan, simpanan berjangka, serta fasilitas pinjaman baik pinjaman

umum dengan batas maksimum hingga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maupun pembiayaan UMKM melalui skema LPDB dirancang dengan asumsi dasar bahwa anggota memiliki *salary-based cash flow*. Dampaknya, seluruh tata kelola risiko, standar pelayanan, serta alokasi modal secara natural mengarah pada segmen anggota yang pendapatannya dapat diverifikasi, sehingga lebih mudah dikelola.

Ketergantungan koperasi pada kelompok pekerja formal membentuk apa yang dapat disebut sebagai path dependency kelembagaan: kebiasaan, kebijakan, dan produk keuangan berkembang mengikuti kebutuhan kelompok dominan dan sulit berubah meskipun terdapat kebutuhan strategis untuk memperluas inklusi ke segmen UMKM. Dengan demikian, data menunjukkan bahwa sejak awal koperasi beroperasi, struktur keanggotaannya telah membentuk: fokus produk pada peminjaman berbasis gaji, prosedur kredit yang mengandalkan slip gaji dan pemotongan langsung, dan alokasi modal yang minim ke pembiayaan produktif. Konfigurasi ini relevan untuk memahami dinamika pembiayaan selanjutnya, termasuk mengapa penetrasi pembiayaan UMKM bertahan di bawah 2,5%, meskipun koperasi memiliki mandat inklusif.

3.2. Mekanisme Pemberian Pinjaman: Akses, Seleksi, dan Praktik Rasionalisasi Risiko



Gambar 2. Jumlah Keanggotaan Berdasarkan Status

Dari 900 anggota, tercatat 300 aktif sebagai peminjam, dan rata-rata terdapat 60 pengajuan pinjaman baru setiap bulan. Tingkat partisipasi ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan relatif terbuka, terutama bagi anggota pekerja formal. Hal ini disebabkan oleh tiga mekanisme utama yang menurunkan biaya informasi dan biaya transaksi.

Pertama, penyederhanaan penilaian kredit. Slip gaji berfungsi sebagai bukti pendapatan sekaligus *proxy* kapasitas bayar. Dukungan perusahaan dalam bentuk surat keterangan kerja memperkuat presisi *screening*, sehingga koperasi tidak memerlukan proses *appraisal* rumit sebagaimana perbankan. Sistem ini terbukti efektif dalam menekan *credit processing time* dan menjaga disiplin pembayaran melalui pemotongan otomatis gaji.

Kedua, penerapan bunga flat. Koperasi menggunakan skema bunga sebesar 1,9% flat untuk pinjaman umum dan 1,25% flat untuk pembiayaan UMKM. Penggunaan sistem bunga flat memudahkan anggota karena perhitungannya sederhana dan tidak mengacu pada sisa pokok pinjaman, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman mengenai beban angsuran. Namun, pendekatan ini memiliki implikasi tertentu: tarif flat yang relatif rendah untuk UMKM dapat menyebabkan *underpricing* risiko, mengingat karakteristik usaha mikro yang cenderung lebih fluktuatif dan memiliki profil risiko operasional yang lebih tinggi dibandingkan peminjam dengan pendapatan tetap.

Ketiga, persyaratan agunan pada dasarnya tidak berbeda antara anggota karyawan dan pelaku UMKM. Koperasi tetap menggunakan bentuk jaminan yang lazim dalam pembiayaan mikro, seperti BPKB kendaraan, surat berharga, atau aset bergerak lain yang dapat diuangkan.

Perbedaan bukan terletak pada jenis agunan, melainkan pada legalitas usaha yang wajib dipenuhi oleh peminjam UMKM ketika mengakses skema pembiayaan berbunga rendah dari Kementerian Koperasi. Pada skema ini, pelaku UMKM harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menunjukkan bahwa kegiatan usahanya terdaftar secara resmi dalam sistem OSS (Online Single Submission). NIB berfungsi sebagai legalitas dasar usaha, sebagaimana akta pendirian bagi badan usaha yang berbentuk perseroan atau firma.

Meskipun proses pendaftarannya sederhana, kewajiban legalitas ini sering menjadi hambatan bagi pelaku mikro yang belum terbiasa dengan prosedur formal, sehingga menurunkan tingkat akses mereka terhadap pembiayaan UMKM. Kombinasi ketiga mekanisme ini memang memperluas akses bagi pekerja, tetapi secara bersamaan menciptakan barrier institusional bagi UMKM. Artinya, keberhasilan pada satu segmen (pekerja) belum tentu selaras dengan kebutuhan segmen lain (UMKM). Di sinilah terjadi apa yang dalam literatur keuangan inklusif dikenal sebagai *inclusion exclusion paradox*.

3.3. Pembiayaan UMKM: Ketidakesesuaian Skema dan Keterbatasan Pasar

Skema pembiayaan UMKM berbasis dana LPDB dirancang sebagai instrumen intermediasi produktif dengan bunga rendah. Namun, implementasinya pada konteks koperasi menunjukkan adanya kombinasi antara kelemahan desain produk dan karakter pasar lokal, sehingga skema ini tidak banyak dimanfaatkan pelaku usaha mikro. Empat faktor utama dapat diidentifikasi, yakni: kewajiban simpanan awal Rp1 juta. Ketentuan simpanan awal berfungsi sebagai buffer risiko, tetapi bagi pelaku usaha mikro, khususnya sektor kuliner rumahan dan pedagang kecil menyediakan dana idle sebesar Rp1 juta bukan hal mudah. Persyaratan ini menimbulkan hambatan awal yang secara praktik mirip dengan eksklusivitas perbankan: kelompok yang paling membutuhkan modal justru menjadi pihak yang paling sulit memenuhi syarat administratif; pola setoran wajib mingguan. Setoran mingguan dimaksudkan sebagai mekanisme disiplin pembayaran, namun tidak selaras dengan pola pendapatan UMKM yang fluktuatif. Banyak usaha mikro memiliki arus kas tidak stabil, tergantung musim, pesanan, dan perputaran harian yang tidak menentu. Kondisi ini membuat kewajiban mingguan meningkatkan risiko gagal setoran meskipun usaha sebenarnya berjalan; tenor maksimal 12 bulan. Tenor pendek sesuai kebijakan LPDB, tetapi kurang relevan untuk pembiayaan produktif. Berbagai jenis usaha mikro membutuhkan waktu 18–36 bulan untuk mencapai titik impas. Tenor 12 bulan menyebabkan beban angsuran menjadi berat, sehingga risiko meningkat bukan karena usaha gagal, melainkan karena struktur cicilan tidak kompatibel dengan pola pengembalian modal pelaku UMKM; persyaratan agunan berupa aset produktif. Penggunaan jaminan seperti BPKB atau peralatan usaha sejalan dengan praktik pembiayaan mikro, tetapi bagi banyak UMKM, aset tersebut merupakan satu-satunya sarana produksi. Menjadikannya agunan menimbulkan kekhawatiran kehilangan alat usaha apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Faktor psikologis ini cukup kuat untuk mengurangi minat pengajuan pembiayaan, meskipun bunga yang ditetapkan relatif rendah.

Karakter Pasar Lokal sebagai Faktor Penentu Rendahnya Akses UMKM

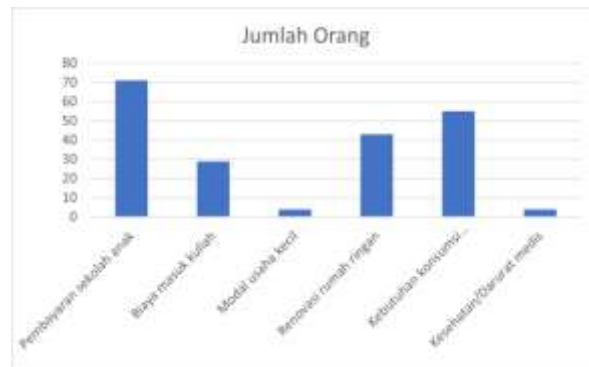
Selain faktor desain produk, rendahnya jumlah peminjam UMKM juga dipengaruhi oleh komposisi pasar anggota. Wilayah Cikampek dan sekitarnya didominasi oleh pekerja formal sektor industri. Sebagian besar anggota koperasi merupakan karyawan dengan pendapatan tetap, sementara basis UMKM produktif justru lebih banyak berada di desa-desa penyangga atau kawasan non-industri.

Di sisi lain, plafon pembiayaan UMKM sebesar Rp20 juta relatif memadai untuk usaha rumahan berskala kecil, tetapi kurang relevan untuk konteks urban. Untuk memulai usaha di wilayah kota terutama yang memerlukan sewa kios atau gerai nilai tersebut masih jauh dari memadai karena biaya sewa tempat di kawasan komersial dapat mencapai puluhan juta rupiah per tahun. Kondisi ini membuat skema UMKM koperasi lebih cocok untuk pelaku mikro di desa, bukan untuk calon wirausaha di perkotaan.

3.4. Pola Penggunaan Dana: Dominannya Pembiayaan Konsumtif

Data anggota menunjukkan bahwa mayoritas peminjaman digunakan untuk kebutuhan konsumtif: biaya rumah tangga, pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, hingga penutupan hutang informal. Pola ini bukan hal negatif; dalam literatur *household finance*, fenomena ini disebut sebagai *consumption smoothing*, yaitu upaya rumah tangga mengelola volatilitas pendapatan dan pengeluaran tak terduga.

Namun fenomena ini menghasilkan empat konsekuensi penting yaitu: perubahan fungsi koperasi. Koperasi berfungsi lebih sebagai lembaga kredit konsumtif dengan risiko rendah, bukan sebagai lembaga intermediasi untuk pertumbuhan ekonomi anggota; minimnya alokasi modal produktif. Kapasitas koperasi untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal melalui UMKM menjadi terbatas; potensi tekanan likuiditas jangka panjang. Jika seluruh pinjaman tidak menghasilkan pendapatan baru bagi anggota, risiko *debt fatigue* meningkat, terutama ketika terjadi kontraksi ekonomi; ketergantungan koperasi pada kesehatan sektor industri. Karena sumber pembayaran utama berasal dari gaji, koperasi akan mengalami dampak besar bila terjadi PHK masal atau penurunan aktivitas industri.



Gambar 3. Distribusi Penggunaan Dana Anggota

Grafik memperlihatkan bahwa hampir seluruh pembiayaan digunakan untuk kebutuhan konsumtif, terutama pembayaran sekolah anak (71 orang), konsumsi rumah tangga (55 orang), serta renovasi rumah ringan (43 orang). Penggunaan yang benar-benar produktif, yakni modal usaha kecil, hanya muncul pada 4 orang. Pola ini menunjukkan bahwa pembiayaan koperasi lebih dominan menopang kebutuhan konsumsi anggota dibandingkan aktivitas pengembangan usaha.

3.5. Arsitektur Mitigasi Risiko: Kuat untuk Pembiayaan Gaji, Lemah untuk UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur mitigasi risiko KSP lebih berfungsi baik untuk anggota yang memiliki pendapatan tetap, tetapi tidak cukup memadai untuk pembiayaan produktif UMKM. Terdapat empat kelemahan struktural yang menjadi penyebab utamanya, yakni: tidak adanya mekanisme pemotongan otomatis gaji

Pembayaran angsuran sepenuhnya dilakukan secara mandiri oleh anggota. Ketiadaan auto-debit membuat koperasi tidak memiliki kontrol atas arus pembayaran, meningkatkan risiko keterlambatan maupun *moral hazard* ketika anggota mengalami tekanan finansial; Tidak ada hubungan kelembagaan dengan perusahaan

Koperasi tidak memiliki MoU atau kerja sama verifikasi dengan perusahaan tempat anggota bekerja. Selama anggota memiliki slip gaji atau surat keterangan kerja, pengajuan dapat diproses. Tanpa koneksi kelembagaan, koperasi kesulitan mendeteksi perubahan kondisi pekerjaan anggota (mutasi, PHK, atau penurunan pendapatan); Mitigasi risiko untuk pembiayaan UMKM masih terbatas. Dalam pembiayaan UMKM, mitigasi risiko koperasi masih berfokus pada verifikasi legalitas usaha melalui NIB, pengecekan keberadaan usaha, dan penilaian arus kas dasar melalui wawancara. Pendekatan ini sesuai bagi UMKM mikro yang membutuhkan proses sederhana, tetapi ketiadaan evaluasi arus kas yang lebih terstruktur serta monitoring setelah pencairan membuat proyeksi kemampuan bayar kurang akurat.

Koperasi sebenarnya memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah melalui dukungan non- pembiayaan, seperti pelatihan pemasaran dasar atau pencatatan keuangan sederhana yang relevan bagi usaha mikro. Peran pendukung ini tidak harus formal atau kompleks, namun dapat membantu anggota meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat kualitas pembiayaan produktif. Tanpa penguatan fungsi ini, pembiayaan UMKM tetap memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman berbasis gaji; Kinerja kredit yang baik lebih dipengaruhi kondisi eksternal, bukan kekuatan sistem: rendahnya kredit bermasalah terutama dipengaruhi oleh karakteristik wilayah Cikampek yang didominasi pekerja formal dengan pendapatan stabil, serta peminjam yang relatif disiplin. Sistem mitigasi risiko koperasi belum pernah diuji dalam kondisi tekanan seperti penurunan ekonomi atau PHK massal.

3.6. Strategi Akuisisi Anggota: Efektif tetapi Tidak Skalabel

Strategi rekrutmen koperasi mengandalkan kedekatan sosial: kunjungan ke perusahaan, rekomendasi rekan kerja, dan media sosial. Strategi ini efektif dan murah, namun memiliki tiga batas utama, yakni: ketergantungan pada jejaring industri. Ini menghambat koperasi memperluas pasar ke luar kawasan industry; Segment-locking,

Koperasi menjadi terperangkap dalam satu segmen sehingga sulit bertransformasi menjadi lembaga yang melayani UMKM secara lebih luas; modernisasi terbatas. Berkenaan dengan media sosial disebutkan bahwa anak muda tertarik untuk terlibat yang diinformasikan melalui konten visual ataupun interaktif yang diproduksi dari media sosial [15]. Walaupun media sosial digunakan, inti operasional tetap berbasis manual dan relasional, sehingga efisiensi dan daya tarik terhadap generasi muda terbatas.

3.7. Model Konseptual: *Dual-Role Cooperative Finance*

Model konseptual penelitian ini menggambarkan bahwa koperasi simpan pinjam memegang dua fungsi pembiayaan yang secara struktural berbeda, tetapi selama ini diperlakukan melalui desain produk yang sama. Pertama, pembiayaan konsumtif berfungsi menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga anggota, khususnya pekerja formal dengan pendapatan tetap. Kedua, pembiayaan produktif ditujukan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil melalui akses modal dengan bunga rendah.

Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian mendasar antara kedua peran tersebut. Pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif memiliki karakter risiko, kebutuhan informasi, mekanisme monitoring, serta siklus pengembalian yang berbeda. Ketika keduanya menggunakan rancangan produk yang sama, salah satu fungsi tidak berjalan optimal inilah yang terjadi pada pembiayaan produktif UMKM di KSP.

Kerangka *Dual-Role Cooperative Finance* menegaskan bahwa koperasi hanya dapat beroperasi efektif apabila membangun dua arsitektur pembiayaan yang berbeda: satu untuk pinjaman konsumtif berbasis pendapatan tetap, dan satu lagi untuk pembiayaan usaha dengan karakter risiko yang lebih kompleks. Pemisahan ini bukan sekadar teknis, tetapi bersifat institusional karena menentukan arah manajemen risiko, penetapan bunga, tenor, monitoring, dan strategi keberlanjutan portofolio.

3.8. Tantangan Kelembagaan dan Implikasi Kebijakan

Tantangan Kelembagaan dari hasil penelitian mengidentifikasi empat tantangan utama yang memengaruhi kinerja pembiayaan koperasi: risiko konsentrasi industri, karena mayoritas anggota berasal dari sektor pekerja formal yang relatif homogen, sehingga koperasi sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi sektor tersebut; Desain pembiayaan UMKM yang tidak sesuai karakter lapangan, terutama terkait tenor, setoran, dan agunan yang kurang adaptif terhadap dinamika usaha mikro; Ketiadaan mekanisme pendampingan usaha, yang membuat koperasi tidak memiliki gambaran perkembangan usaha setelah pencairan dana; kapasitas analisis usaha yang terbatas, karena sebagian besar pencairan masih bergantung pada wawancara langsung tanpa dukungan pencatatan keuangan yang memadai.

Implikasi Kebijakan bagi Koperasi mengacu pada tantangan tersebut, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan adalah: pengembangan *risk-based product differentiation*, yaitu memisahkan skema pinjaman konsumtif dan produktif dengan pendekatan risiko yang berbeda; Integrasi koperasi dengan program pendampingan UMKM daerah, sehingga monitoring usaha dapat dilakukan lebih sistematis tanpa membebani Koperasi; penguatan kapasitas digital, khususnya dalam monitoring arus kas pinjaman, pencatatan sederhana, dan pelaporan anggota; Pemisahan portofolio konsumtif–produktif secara administratif agar evaluasi risiko lebih jelas.

Implikasi Kebijakan bagi Pemerintah di tingkat makro, temuan penelitian memberikan sinyal bahwa kebijakan pembiayaan UMKM perlu lebih fleksibel terhadap realitas usaha mikro adalah: skema pembiayaan LPDB perlu menyediakan ruang penyesuaian bagi UMKM mikro yang tidak memiliki *collateral* memadai; tenor yang lebih panjang (18–24 bulan) diperlukan agar pengembalian modal sesuai dengan siklus usaha kecil; penggunaan jaminan *non-asset-based* perlu diperluas, termasuk skema penjaminan kelompok (*collective guarantee*); kemudahan administratif harus diterapkan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.

3.9. Sintesis: Keberhasilan Koperasi dan Batasannya

KSP X menunjukkan kinerja yang kuat dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan rumah tangga bagi pekerja formal. Produk pinjaman konsumtif berjalan stabil, tingkat risiko rendah, dan proses pengelolaan angsuran dapat dilakukan dengan efisien. Namun keberhasilan tersebut sekaligus memperlihatkan batasan struktural dalam ekspansi menuju pembiayaan produktif.

Pertama, desain pembiayaan yang ada tidak dirancang untuk kebutuhan usaha mikro sehingga penggunaan dana produktif tetap rendah. Kedua, struktur risiko koperasi masih sangat bergantung pada stabilitas pendapatan sektor pekerja—yang berarti keberhasilan belum mencerminkan ketahanan institusional dalam jangka panjang. Ketiga, hambatan utama pembiayaan UMKM bukan pada tingkat bunga, tetapi pada ketidaksesuaian desain produk dengan pola operasi usaha mikro.

Dengan demikian, koperasi dapat dikatakan berhasil dalam fungsi konsumtif, tetapi belum sepenuhnya berhasil dalam fungsi produktif. Transformasi kelembagaan menjadi kebutuhan utama apabila koperasi ingin memperluas peran ekonomi dan mendukung UMKM secara lebih efektif.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam X cabang Cikampek memiliki peran penting dalam menyediakan akses permodalan bagi anggotanya, baik karyawan maupun pelaku usaha mikro. Peran tersebut tercermin dalam mekanisme pembiayaan yang dirancang untuk menjangkau kebutuhan nyata anggota, skema bunga dan persyaratan pinjaman yang disesuaikan dengan kapasitas mereka, serta penerapan mitigasi risiko yang menjaga keberlanjutan operasional koperasi. Meskipun demikian, hasil penelitian menegaskan adanya hambatan struktural, terutama terbatasnya penyerapan pembiayaan produktif dan ketidaksesuaian skema pinjaman dengan karakteristik usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi belum sepenuhnya optimal dalam mendorong pemanfaatan dana anggota secara produktif. Secara keseluruhan, penelitian ini telah menjawab seluruh tujuan yang dirumuskan pada pendahuluan dengan menguraikan peran, mekanisme, pola pemanfaatan dana, serta efektivitas pengelolaan risiko yang diterapkan oleh koperasi. Temuan penelitian juga mengonfirmasi bahwa koperasi masih berupaya menyeimbangkan idealisme sebagai lembaga pemberdayaan dengan tuntutan profesionalisme sebagai lembaga keuangan. Koperasi perlu mengembangkan skema pembiayaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan usaha mikro, misalnya melalui fleksibilitas tenor, pendampingan usaha, atau evaluasi ulang syarat jaminan. Selain itu, penguatan kapasitas anggota dalam literasi keuangan dapat membantu meningkatkan pemanfaatan dana secara produktif. Koperasi juga disarankan memperluas inovasi layanan agar tetap relevan di tengah persaingan lembaga keuangan modern. Penelitian berikutnya dapat mengkaji efektivitas model pembiayaan koperasi berbasis sektor tertentu atau menilai dampak pendampingan usaha terhadap keberhasilan pembiayaan produktif. Arah pengembangan penelitian juga dapat diarahkan pada analisis implementasi teknologi digital dalam operasional koperasi atau pengembangan model pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha mikro. Temuan penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai dasar evaluasi kebijakan koperasi dalam memperkuat fungsi intermediasi keuangan bagi masyarakat. Saran yang membangun koperasi perlu mengembangkan skema pembiayaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan usaha mikro, misalnya melalui fleksibilitas tenor, pendampingan usaha, atau evaluasi ulang syarat jaminan. Selain itu, penguatan kapasitas anggota dalam literasi keuangan dapat membantu meningkatkan pemanfaatan dana secara produktif. Koperasi juga disarankan memperluas inovasi layanan agar tetap relevan di tengah persaingan lembaga keuangan modern. Penelitian berikutnya dapat mengkaji efektivitas model pembiayaan koperasi berbasis sektor tertentu atau menilai dampak pendampingan usaha terhadap keberhasilan pembiayaan produktif. Arah pengembangan penelitian juga dapat diarahkan pada analisis implementasi teknologi digital dalam operasional koperasi atau pengembangan model pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha mikro. Temuan penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai dasar evaluasi kebijakan koperasi dalam memperkuat fungsi intermediasi keuangan bagi masyarakat.

Referensi

- [1] G. A. Wibowo, B. Triyono, A. Surya, and U. Samudra, "Strategi Pengembangan Koperasi Mandiri sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *JIPM J. Inov. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 2, pp. 75–82, 2024.
- [2] F. Amelliyah, M. M. Firmansyah, U. T. Madura, and P. T. Inda, "SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA : DARI MASA KOLONIAL HINGGA ERA MODERN," *J. Media Akad.*, vol. 3, no. 6, 2025.
- [3] N. K. Indrawati, D. Nurbatin, and P. Lestari, "Pelatihan Pengelolaan Pengeluaran Produktif Terhadap Laba Akuntansi Pada UMKM," *EDUABDIMAS J. Edukasi Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–8, 2023.
- [4] M. Y. Poling *et al.*, "Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Pada KSP Kopdit Ikamala," *J. Mutiara Ilmu Akunt.*, vol. 1, no. 2, 2023.
- [5] B. R. Moan, W. Mitani, and P. L. Lamawitak, "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Sube Huter Nita Dalam Mendukung Permodalan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *JREA J. Ris. Ekon. Dan Akunt.*, vol. 1, no. 3, 2023, doi: <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i3.760>.
- [6] A. A. Dzirkullah and U. Chasanah, "Jurnal Investasi Islam Jurnal Investasi Islam," *J. Investasi Islam*, vol. 05, no. 01, pp. 667–686, 2024, [Online]. Available: <https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi/article/view/205>
- [7] R. Safarudin, M. Kustati, and N. Sepriyanti, "Penelitian Kualitatif," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 2, pp. 9680–9694, 2023.
- [8] A. A. Purba, N. Natasya, and M. Irham, "Strategi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah Menggunakan Metode

- Kualitatif Deskripsi,” *Digit. Bisnis J. Publ. Ilmu Manaj. dan E- Commer.*, vol. 4, no. 1, 2025, [Online]. Available: <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Digital/article/view/3857>
- [9] D. I. Amal, Radjikan, and M. R. Basyar, “Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Studi Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik Jawa Timur),” *Triwikrama J. Multidisiplin Ilmu Sos.*, vol. 9, no. 5, 2025.
- [10] N. R. Setyawati and E. I. Sa’adah, “Urgensi Manajemen Mutu Pendidikan Formal,” *MIYAH J. Stud. Islam*, vol. 21, no. 1, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/1197/688>
- [11] G. Daruhadi and P. Sopiati, “Pengumpulan Data Penelitian,” *J-CEKI J. Cendekia Ilm.*, vol. 3, no. 5, pp. 5423–5443, 2024.
- [12] M. Waruwu, “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan,” *Afeksi J. Penelit. dan Eval. Pendidik.*, vol. 5, no. 2, 2024, [Online]. Available: <https://pdfs.semanticscholar.org/8de8/be521b4102a42c318fec3d4ec4dcd375ff94.pdf>
- [13] R. N. Shalsabila and S. Ningsih, “Pembinaan Pegawai Bagian Management Trainee di PT Jasa Marga Pusat Jakarta Timur,” *PANDITA Interdiscip. J. Public Aff.*, vol. 6, no. 2, pp. 154–164, 2023.
- [14] D. Annasthasya, I. Alfindoria, S. Rahayu, and O. I. Khair, “Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur Dalam Konteks Pendidikan,” *J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 3, no. 7, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/jim/article/view/1070/835>
- [15] S. Andini, D. W. Adhani, and R. Sartika, “Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Generasi Muda,” *EDUSOS J. Edukasi dan Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 1, 2025, [Online]. Available: <https://journal.ininnawaparaedu.com/edusos/article/view/252/211>